



► HUNIAN WARGA JOGJA

## Jumlah RTLH Ditekan hingga 1.500

**UMBULHARJO–Pemkot Jogja berupaya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi sekitar 1.500 unit pada akhir 2022.**

Harian Jogja  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)

Pada awal 2022, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Jogja tercatat 2.187 unit dengan sebaran paling banyak di Kemantren Tegaltrejo.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja Agus Tri Haryono di Jogja, mengatakan bahwa pengurangan jumlah RTLH antara lain dilakukan melalui perbaikan rumah menggunakan pendanaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Menurut dia, penggunaan pendanaan dari CSR untuk perbaikan rumah tidak layak huni lebih fleksibel, bisa mencakup rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat mendapat bantuan dari pemerintah daerah.

Rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat mendapat bantuan dari pemerintah daerah antara lain rumah tidak layak huni yang tidak memiliki syarat formal berupa alas hak yang jelas.

"Apabila membutuhkan bantuan untuk perbaikan rumah, maka bisa diintervensi melalui CSR. Salah satunya adalah dari Badan Amil Zakat Nasional [Baznas] Kota Jogja," kata Agus.

Selain melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, Pemerintah Kota Jogja berupaya meningkatkan kualitas permukiman melalui penataan wilayah serta menyediakan rumah susun.

Penataan wilayah permukiman di kawasan kumuh yang berada di bantaran sungai dilaksanakan dengan konsep M3K atau mundur, *munggah*, dan *madhep* kali,

- Pada awal 2022, jumlah rumah tidak layak huni di Kota Jogja tercatat 2.187 unit.
- Sebaran RTLH paling banyak di Kemantren Tegaltrejo.

### Apabila membutuhkan bantuan untuk perbaikan rumah, maka bisa diintervensi melalui CSR.

**Agus Tri Haryono**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja

yakni dengan memundurkan bangunan, menaikkan bangunan, dan menghadapkan bangunan ke arah sungai. "Penataan M3K di bantaran sungai terkesan dilakukan spot demi spot. Karena memang rumah warga di tepi sungai memiliki luasan kecil sehingga jika harus dipangkas dan dinaikkan tentu luasanya semakin kecil. Jadi diprioritaskan yang lebih memungkinkan untuk dimundurkan," kata Agus.

### Penataan Permukiman

la menambahkan penataan permukiman di daerah bantaran sungai dilakukan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. Tahun ini penataan permukiman di bantaran sungai dilakukan di Kelurahan Prenggan menggunakan dana Rp1,8 miliar dari APBD Kota Jogja.

Luas kawasan permukiman kumuh di Kota Jogja yang pada awal 2021 tersisa 114 hektare sudah bisa dikurangi sekitar 20 hektare berkat program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Jogja menargetkan pada akhir 2022 luas kawasan permukiman kumuh berkurang menjadi di bawah 90 hektare. (Antara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005